

BAB II

DASAR TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2006) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan dibuat adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi komponen berikut:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode.

- e. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan dibuat dengan berdasarkan suatu standar atau aturan tertentu agar mudah dimengerti serta dapat diperbandingkan antara laporan keuangan suatu entitas dengan entitas lainnya. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima periode penting (Juan dan Wahyuni, 2012).

1. Periode pertama adalah masa Pra-PAI sebelum tahun 1973. Pada saat itu Indonesia tidak memiliki standar akuntansi keuangan yang baku dan terkodifikasi. Penggunaan laporan keuangan oleh pihak luar manajemen jarang terjadi, kecuali untuk pelaporan fiskal. Audit tahunan lazimnya hanya dilakukan atas laporan keuangan BUMN/BUMD dan perusahaan asing yang sangat sedikit jumlahnya. Pendapat wajar pada laporan keuangan yang disajikan auditor masih diragukan karena akuntan masih sangat sedikit dan belum jelas apa yang disebut “prinsip akuntansi yang lazim berlaku”.
2. Periode PAI (1973-1984). Periode ini adalah periode persiapan pengaktifan pasar modal, dan lahirnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang berpedoman pada karya Paul Grady dari AICPA di AS. Standar ini tidak

berkembang hingga tahun 1984. Dari satu sisi hal ini dapat dimengerti karena jumlah perusahaan yang terdaftar pada pasar modal kurang dari dua puluh lima.

3. Masa Penerapan PAI 1984 (1984-1994). Komite PAI melakukan revisi mendasar pada PAI 1973 dengan tujuan menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.
4. Masa Penerapan SAK (1994-2006). PAI pada akhirnya berganti nama menjadi IAI. Dimana pada periode ini telah terjadi fenomena penting dalam perekonomian, bisnis nasional dan global. Standar mengacu pada IAS, US GAAP, dan dikembangkan sendiri. Sejak tahun 2004 revisi SAK dilakukan pada tahun 2008 dan dikeluarkan oleh IAI mulai tahun 2009.
5. Masa Konvergensi IFRS (2006-2012). Pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah, sampai akhir 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru 10 standar dari 33 standar

2.1.1. Laporan Laba Rugi

Pernyataan Standar Akuntansi no 1 (Revisi 2009) menyebutkan Laba bersih adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sementara Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah menyajikan laba untuk periode waktu yang lebih pendek guna memberikan sarana pengendalian dan sebagai dasar untuk keputusan pemegang saham, kreditor, dan manajemen atas dasar berkelanjutan atau periodik. Apabila laba dilihat dari pendekatan secara pragmatik, angka laba dinyatakan mempunyai dampak langsung pada harga pasar saham. Bukti pertama dari hubungan antara laba akuntansi dan harga sekuritas diberikan oleh Profesor Australia, Ray Ball dan Philip Brown, yang berada di University of Chicago, yaitu pada dasarnya harga sekuritas bergerak searah dengan laba akuntansi. Bukti tersebut menunjukkan bahwa elemen yang menjadi perhatian pengguna laporan keuangan adalah laba. Angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan kinerja perusahaan tetapi penting juga sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang dilihat oleh banyak seperti profesi akuntansi, pengusaha, analis keuangan (Hendriksen dan Breda, 2006).

Laba menurut cakupannya dibagi menjadi dua konsep, yaitu *Current Operating Concept (Earnings)* dan *All Inclusive Concept*. Menurut konsep *current operating concept* atau laba periode pengaruh kumulatif akibat perubahan akuntansi tidak boleh dimasukkan. Sementara menurut konsep *all inclusive concept* laba adalah semua perubahan dan kenaikan net asset selama periode tertentu, kecuali investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik (transaksi modal). (SFAC 5, 1984)

2.2. IFRS

Menurut Douplik dan Perera (2012) *The International Accounting Standards Committee (IASC)* dibentuk pada tahun 1973 dengan persetujuan 10 negara (Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Meksiko, dan Belanda), dengan tujuan mencapai keseragaman dalam penggunaan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan seluruh dunia. Aktivitas IASC yang signifikan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahun 1989 – 1993 dimana IASC menentukan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, definisi dari elemen-elemen laporan keuangan, dan kriteria pengakuan elemen-elemen laporan keuangan. Aktivitas kedua adalah melakukan proyek perbandingan dengan tujuan mengeliminasi pilihan-pilihan yang banyak dilakukan dalam perlakuan akuntansi. Fase final dari IASC adalah mengembangkan 30 inti utama dari standar internasional yang dapat disahkan IOSCO. Dan pada tahun 2000 IOSCO menyetujui penggunaan IAS untuk penerbitan saham antar Negara (*cross border listing*) dengan *press release* 17 May 2000.

IASC menghadapi masalah legitimasi berkaitan dengan dukungan konstituen, kemandirian, dan keahlian teknis. Misalnya, beberapa pihak merasakan anggota dewan IASC bekerja di standar internasional hanya paruh waktu dan mereka belum tentu dipilih karena keahlian teknis mereka. Indikasi yang terlihat kurangnya komitmen pada bagian dari IASC untuk mengembangkan standar dengan kualitas tertinggi. Sampai pada tahun 1999-2000, IASC melakukan restrukturisasi (dengan mengubah konstitusi, strategi, struktur dan nama) menjadi *International Accounting Standard Board* (IASB), IASC berkeinginan untuk menjadi badan akuntansi yang lebih independen dan profesional. Kemudian IASC Trustees mengaktifkan Part B dari IASC *Constitution* yang baru dan menetapkan *non-profit Delaware corporation* yang diberi nama *International Accounting Standards Committee Foundation* untuk mengawasi IASB.

IASB berperan sebagai pengganti IASC sebagai *standard setter*, sementara IASC menjadi *foundation*. Pada saat itu juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya, dan memberi nama standar baru yang diterbitkannya dengan nama IFRS (*International Financial Reporting Standards*). IAS yang belum digantikan dengan IFRS tetap berlaku. Standar pertama yang merupakan produk IASB adalah IFRS 1: *First Time Adoption of IFRS* pada tahun 2003.

IASB membuat IFRS dengan tujuan memastikan bahwa keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas yaitu:

1. Transparan dan relevan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

IFRS digunakan di banyak bagian dunia, termasuk Uni Eropa, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, negara-negara GCC, Rusia, Afrika Selatan, Singapura, dan Turki. Sejak 27 Agustus 2008, lebih dari 113 negara di seluruh dunia, termasuk seluruh Eropa, saat ini membutuhkan atau mengizinkan pelaporan berdasarkan IFRS. Sekitar 85 negara-negara membutuhkan IFRS pelaporan untuk semua perusahaan domestik yang terdaftar.

2.2.1. Masa Konvergensi IFRS di Indonesia (2006 – 2012)

Dinyatakan dalam Juan dan Wahyuni (2013) Indonesia memperhatikan semakin maraknya negara-negara lain seperti Australia mengadopsi IFRS secara penuh, maka pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya tidak lah mudah. Banyak kendala yang terjadi dalam konvergensi tersebut. Beberapa kendala yang terjadi adalah minimnya sumberdaya untuk mendukung DSAK-IAI yang semua anggotanya adalah paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lain IFRS cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit mengujarnya.

Masa tranlasi

menjadi kendala karna tidak mudah mencari padanan kata yang tepat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan apakah Indonesia siap dalam mengadopsi IFRS.

Namun terlepas dari segala kendala yang menghadang, DSAK-IAI semakin mengukuhkan niatnya untuk mengadopsi IFRS karena memang IFRS memiliki banyak kelebihan, yaitu:

1. IFRS dihasilkan oleh lembaga internasional yang independen sehingga pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.
2. Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif melalui riset yang mendalam. Komentar untuk *discussion paper* maupun *exposure draft* keluaran IASB datang dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.
3. IFRS adalah standar yang berbasis pada prinsip (*Principle based*) sehingga peraturannya lebih sederhana dibandingkan dengan standar pelaporan keuangan keluaran Amerika Serikat yang lebih terperinci dan rumit (*Rule based*).
4. IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi (*disclosure*) yang lebih detail dan terperinci sehingga membantu pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang relevan.
5. IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah bukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentengi skandal-skandal

perusahaan besar seperti kasus Enron dan World.com. (Juan dan Wahyuni, 2013)

Pada intinya *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Indonesia telah mendeklarasikan program konvergensi terhadap IFRS ini, pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas yang ada di Indonesia.

2.2.2. Perbedaan Mendasar Pengadopsian IFRS ke PSAK

Menurut Ankarath, *et al* (2012) PSAK yang semula berdasarkan *historical Cost* mengubah paradigmanya menjadi *Fair Value based*. Terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas dan ekuitas. *Fair Value based* mendominasi perubahan-perubahan di PSAK untuk konvergensi ke IFRS selain hal-hal lainnya. Sebagai contoh perlunya di lakukan penilaian kembali suatu aset, apakah terdapat penurunan nilai atas suatu aset pada suatu tanggal pelaporan. Hal ini untuk memberikan keakuratan atas suatu atas suatu laporan keuangan. PSAK yang semula lebih berdasarkan *Rule Based* (sebagaimana US GAAP) berubah menjadi *Principle Based*. *Rule based* adalah

manakala segala sesuatu menjadi jelas diatur batasan batasannya. Sebagai contoh adalah manakala sesuatu *materiality* ditentukan misalkan diatas 75% dianggap material dan ketentuan-ketentuan jelas lainnya.

Selain itu IFRS menganut prinsip *principle based* dimana yang diatur dalam PSAK *update* untuk mengadopsi IFRS adalah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Akuntan / *Management* perusahaan sebagai dasar acuan untuk kebijakan akuntansi perusahaan. Dan yang terakhir pemutakhiran (*Update*) PSAK untuk memunculkan transparansi dimana laporan yang dikeluarkan untuk eksternal harus cukup memiliki kedekatan fakta dengan laporan internal. Pihak perusahaan harus mengeluarkan pengungkapan (*disclosures*) penting dan signifikan sehingga para pihak pembaca laporan yang dikeluarkan ke eksternal benar-benar dapat menganalisa perusahaan dengan fakta yang lebih baik.

2.3. Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah IFRS

Pengadopsian standar akuntansi internasional (IFRS) ke dalam standar akuntansi domestik (PSAK) khususnya laporan laba rugi bertujuan menghasilkan laporan laba rugi yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan *item-item* pengungkapan akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula. Manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan laba rugi akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk pendapatan dan beban perusahaan (Martani *et al*, 2012).

2.3.1. Laporan Laba Rugi Sebelum IFRS (Laba bersih atau laba tahun berjalan)

Menurut PSAK 1 (Revisi 1998) Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih periode berjalan (paragraf 56).

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan secara wajar. Laba atau rugi bersih periode berjalan didapat dari total selisih pendapatan dan beban perusahaan yang tidak mencakup komponen penghasilan komprehensif lainnya.

2.3.2 Laporan Laba Rugi Sesudah IFRS (Laporan Laba Rugi Komprehensif)

PSAK 1 mengatur bahwa seluruh pos penghasilan dan pengeluaran yang diakui dalam suatu periode dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika tidak diwajibkan oleh standar akuntansi lain (Paragraf 78). Dalam PSAK 1 (Revisi 2009), perusahaan harus menyajikan pendapatan komprehensif lain selain laba rugi dari operasi. Hal ini merupakan perbedaan dari PSAK 1 sebelumnya yang tidak mensyaratkan penyajian pendapatan komprehensif lain. PSAK 1 mengatur bahwa

laporan laba rugi komprehensif minimal menyajikan unsur laba (rugi) tahun berjalan atau dikenal dengan laba bersih beserta dengan pendapatan komprehensif lainnya. Berikut adalah tabel yang berisi komponen laporan laba rugi komprehensif:

Tabel 2.1
Komponen Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laba Tahun Berjalan / Laba Bersih	Laba komprehensif
Pendapatan	Pendapatan
Biaya Keuangan	Biaya Keuangan
Bagian laba/(rugi) perusahaan asosiasi dan ventura bersama	Bagian laba/(rugi) perusahaan asosiasi dan ventura bersama
Beban pajak	Beban pajak
Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari : -laba/rugi setelah pajak dari operasi dalam penghentian -penilaian ulang atau pelepasan operasi dalam penghentian	Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari : -laba/rugi setelah pajak dari operasi dalam penghentian -penilaian ulang atau pelepasan operasi dalam penghentian
Laba/rugi neto tahun berjalan	Laba/rugi neto tahun berjalan
	Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya
	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas
	<u>Total laba rugi komprehensif</u>

Sumber: PSAK no 1 (Revisi 2009)

PSAK 1 (Revisi 2009) juga mengatur pos, judul, subjudul, lainnya harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bila diwajibkan oleh SAK atau bila penyajiannya relevan untuk pemahaman terhadap kinerja keuangan entitas (paragraf 82). Harus dicatat bahwa PSAK 1 tidak memperbolehkan penyajian segala pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa di laporan laba rugi komprehensif atau

catatan atas laporan keuangan (paragraf 84). ini merupakan syarat baru di Indonesia karena sebelumnya pos luar biasa biasa disajikan. Pos luar biasa dihapus oleh IASB karena sulitnya menentukan definisi 'luar biasa' karena definisi tersebut antara satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda. Karena tingginya subjektivitas pos luar biasa ditengarai sering dijadikan sarana perusahaan untuk melakukan manajemen laba (JuandaWahyuni, 2012). Dengan dihapusnya Pos luar biasa maka laporan laba rugi komprehensif memiliki nilai yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dibandingkan dengan standar yang dulu.

Selain itu informasi yang dianggap penting dan relevan untuk disajikan adalah Pendapatan komprehensif lain yang harus disajikan berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:

- a. Perubahan surplus revaluasi (PSAK 16 dan 19).
- b. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 24 Imbalan Kerja.
- c. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual (PSAK 55).
- d. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (PSAK 55).

2.3.3. Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan) Sebelum dan Sesudah IFRS

Komponen laba bersih pada laporan laba rugi sebelum dan sesudah IFRS mengalami banyak perubahan. Standar akuntansi keuangan dibuat menjadi lebih detail, lebih objektif serta menghilangkan komponen yang dinilai mengandung subjektivitas yang tinggi yang bisa menjadi celah untuk melakukan manajemen laba, dan lebih mudah dipahami. Beberapa contoh komponen laba bersih yang telah berubah dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Standar dalam PSAK terkait Laba (Rugi) Bersih

Komponen laba bersih sebelum IFRS	Komponen laba bersih sesudah IFRS
PSAK 23 Pendapatan (Revisi 1994) - Tidak ada peraturan khusus untuk mencatat pendapatan bunga dari aset dan dividen efek	PSAK 23 Pendapatan (Revisi 2010) -Pengaturan lebih jelas untuk pendapatan bunga dari aset dimana bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aset tersebut (Paragraf 29a) -Pendapatan dividen diakui apabila tidak menggunakan metode ekuitas saat hak yang ditetapkan diterima (paragraf 29c) dan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
PSAK 14 Persediaan (Revisi 1994) Persediaan yang telah dijual, masuk ke laporan laba rugi dengan akun harga pokok penjualan, dimana persediaan dihitung dengan metode <i>First In First</i>	PSAK 14 Persediaan (Revisi 2008) Persediaan yang telah dijual, masuk ke laporan laba rugi komprehensif dengan akun Beban Pokok Penjualan, dimana persediaan dihitung menggunakan.

Lanjutan Tabel 2.2
Perubahan Standar dalam PSAK terkait Laba (Rugi) Bersih

<p><i>Out (FIFO)</i> barang yang pertama kali dibeli itulah yang pertama kali dijual, <i>average</i> menghitung rata-rata persediaan digudang, <i>Last In First Out (LIFO)</i> barang yang terakhir dibeli itulah yang terakhir dijual.</p>	<p>metode <i>FIFO</i> dan <i>average</i>. Metode <i>LIFO</i> sudah tidak diperkenankan karena bila jumlah persediaan dikurangi penggunaan <i>LIFO</i> dapat menimbulkan penyimpangan hasil operasi karena sebagian beban pokok penjualan didasarkan pada biaya yang telah kadaluwarsa. Biaya yang telah kadaluwarsa membuat nilai ini tidak relevan bagi pengguna laporan keuangan</p>
<p>PSAK 16 (Revisi 1994)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komponen biaya perolehan sendiri terdiri dari: harga beli, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (<i>non-refundable</i>), setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. - Tidak diatur untuk penyusutan bagian aset tetap yang memiliki jumlah signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset. 	<p>PSAK 16 (Revisi 2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tambahan untuk komponen biaya perolehan yang sebelumnya belum diatur yaitu biaya imbalan kerja (psak 24) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, dan biaya biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik. Poin ini membuat nilai aset tetap dan merubah nilai penyusutan per periode nya juga dalam laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya tidak diatur bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah
<p>PSAK 1 (Revisi 1998)</p> <p>Boleh menyajikan pos luar biasa untuk menyajikan hal-hal yang tidak biasa terjadi</p>	<p>PSAK 1 (Revisi 2009)</p> <p>Tidak boleh menyajikan segala pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa di laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan untuk aktivitas yang tidak biasa terjadi. Pos abnormal yang boleh dilaporkan hanyalah informasi yang dapat menjelaskan kinerja entitas untuk periode yang relevan akibat besaran, sifat, atau kejadiannya.</p>

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.4. Relevansi Nilai

Agar laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan oleh banyak pengguna, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengharuskan informasi yang dimuat didalamnya agar memiliki empat karakteristik kualitatif yang salah satunya adalah relevan. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seberapa besar suatu informasi itu dikatakan relevan dapat dilihat dari relevansi nilainya. Relevansi nilai (*value relevance*) informasi akuntansi mempunyai arti kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan nilai perusahaan

Relevansi nilai didefinisikan sebagai kemampuan menjelaskan (*explanatory power*) dari informasi akuntansi dalam kaitannya dengan nilai perusahaan. Pendapat lain relevansi nilai adalah kemampuan menjelaskan (*explanatory power*) informasi akuntansi terhadap nilai pasar perusahaan yang digambarkan dengan harga saham atau return saham. Dalam perkembangannya, penelitian-penelitian mengenai relevansi nilai memang diarahkan untuk menginvestigasi hubungan empiris antara nilai pasar modal (*stock market value*) dengan berbagai angka akuntansi, yang dimaksudkan untuk menilai kegunaan angka-angka akuntansi itu dalam penilaian. (Beaver, 1968).

Teori relevansi nilai merupakan turunan dari teori *clean surplus*. Teori tersebut menjelaskan bahwa nilai perusahaan tercermin pada data-data akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan. Ohlson (1995) mengemukakan bahwa laporan laba/rugi dan neraca dapat menunjukkan nilai pasar perusahaan.

Relevansi nilai informasi akuntansi sering diukur dengan koefisien determinasi, R^2 , dari *price regression model* yang disusun berdasarkan hubungan nilai pasar dan variabel akuntansi dalam model Ohlson. R^2 merupakan pengukur Relevansi nilai yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu (Margani Pinasti, 2004).

2.5. Teori Efisiensi Pasar

Menurut Fama (1970) dalam Hartono (2015) efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Bentuk efisiensi pasar ditinjau dari bisa dari segi ketersediaan informasinya saja atau dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia.

Efisiensi pasar secara keputusan didasarkan pada ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut efisiensi pasar secara informasi. Untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut seperti pengumuman laba, informasi tersebut dapat diolah dengan cepat oleh pasar. Efisiensi pasar untuk pengumuman laba tidak ditentukan dengan seberapa cangih pasar mengolah informasi laba tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia dipasar. Informasi pasar secara ini disebut efisiensi pasar secara efisien. (Hartono, 2015)

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Sementara untuk efisiensi pasar secara

keputusan membutuhkan dua faktor yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar (Hartono, 2015).

Suatu informasi dikatakan efisien atau tidaknya dapat dilihat dari nilai pasar perusahaan. Nilai pasar perusahaan biasanya dapat dilihat dari harga saham yang terjadi di pasar bursa dan ditentukan oleh pelaku pasar pada saat tertentu atau return realisasian yang dihitung berdasarkan data historis. Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya bahkan setiap detik harga saham dapat berubah. Bertemunya titik permintaan dan penawaran saham akan membentuk sebuah titik ekuilibrium yang merupakan hasil kesepakatan antara pelaku pasar sehingga menghasilkan nilai pasar suatu saham yang telah disepakati (Hartono, 2015).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi sebelum dan sesudah menerapkan IFRS telah beberapa kali dilakukan, baik peneliti dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri. Penelitian relevansi nilai ini dilakukan pada saat konvergensi IFRS di Indonesia yaitu tahun mulai tahun 2008 masih baru saja dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga penerapan IFRS pada perusahaan *go public* masih belum menyeluruh.

Penelitian pertama adalah penelitian dari Sinarto dan Christiawan (2013) mengenai pengaruh penerapan IFRS terhadap relevansi nilai laba laporan keuangan di Indonesia menunjukkan adanya relevansi nilai yang meningkat setelah adanya

penerapan IFRS di Indonesia. Adanya *disclosure Other Comprehensive Income (OCI)* membuat informasi akuntansi lebih relevan dalam pengambilan keputusan investor.

Penelitian oleh Purnamasari (2013) mengenai relevansi nilai laba, arus kas, nilai buku, *goodwill*, dan ukuran perusahaan yang membentuk keputusan ekonomi investor, dimana penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa laba dan arus kas mempengaruhi nilai pasar perusahaan yang diukur dengan harga saham, sementara nilai buku, *goodwill*, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi harga saham dan berarti perubahan informasi tersebut tidak mempengaruhi keputusan investor.

Kanagaretnam, *et al* (2009) meneliti di Canada, laba komprehensif memiliki kekuatan hubungan yang lebih besar terhadap harga saham dibandingkan dengan laba bersih, dengan kata lain relevansi nilai laba komprehensif memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Cahyonowati dan Ratmono (2012) aplikasi standar berbasis IFRS di Indonesia belum dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Relevansi laba akuntansi dengan keputusan investasi sebagaimana tercermin pada harga saham tidak meningkat secara signifikan pada periode setelah adopsi IFRS. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan pada tahun 2008 – 2011 dimana belum semua perusahaan yang terdaftar di BEI mengadopsi IFRS. Berikut ringkasan dari penelitian sebelumnya terkait dengan analisis relevansi nilai:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Sinarto dan Christiawan (2013)	Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Relevansi Nilai Laba Laporan Keuangan	Hasil dari penelitian ini laba memiliki relevansi nilai lebih tinggi setelah implementasi IFRS pada 50 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan laba komprehensif memiliki relevansi nilai lebih tinggi dibandingkan laba bersih
Purnamasari (2013)	Relevansi Nilai: Informasi Laba, Arus Kas, Nilai Buku, Goodwill, dan Ukuran Perusahaan yang Membentuk Keputusan Ekonomi Investor	Variabel <i>gross profit margin</i> dan variabel <i>cash flow operation to sales</i> memiliki pengaruh terhadap harga saham. Variabel nilai buku ekuitas yang diproksikan dengan <i>book value per share</i> , variabel <i>goodwill</i> dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Kanagaretnam, et al (2009)	<i>Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan di Canada, pendapatan komprehensif memiliki kekuatan hubungan yang lebih besar terhadap harga saham dibandingkan dengan laba bersih
Cahyonowati dan Ratmono (2012)	Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi standar berbasis IFRS di Indonesia belum dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Relevansi laba akuntansi dengan keputusan investasi sebagaimana tercermin pada harga saham tidak meningkat pada periode setelah adopsi IFRS.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

Menurut Kimney, Jr (1988) dalam Hartono (2014) hipotesis adalah prediksi tentang fenomena. Hipotesis terdiri dari dua jenis yaitu, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki seperti penelitian fisika, kimia, dan lainnya yang hasilnya sudah pasti. Sementara untuk hipotesis alternatif dipakai pada penelitian sosial seperti penelitian akuntansi, keuangan dan lainnya.

2.7.1 Hipotesis Pertama

Adopsi IFRS dilakukan di Indonesia mulai tahun 2006 berlanjut hingga akhir tahun 2011 sebelum akhirnya di implementasikan pertama kali di tahun 2012 melalui SK Bapepam Kep-689/BL/2011. Kebutuhan peningkatan daya banding laporan keuangan mendorong adopsi IFRS di Indonesia. Meningkatnya keakuratan analisis dari para analis keuangan disebabkan oleh standar akuntansi yang telah di konvergensi IFRS mensyaratkan pengungkapan kondisi keuangan yang lebih rinci daripada standar akuntansi sebelumnya. Salah satu PSAK yang telah dikonvergensi IFRS adalah PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” dimana judul laporan laba rugi telah dirubah menjadi laba rugi komprehensif (Ankarath, 2012). Tidak hanya judulnya, beberapa aturan dalam pengakuan dan pengukuran komponen-komponen untuk menghasilkan laba itu sendiri juga ada yang berubah. Beberapa perubahan dari pengakuan dan pengukuran laba dapat meningkatkan kemampuan menjelaskan (relevansi nilai) dari informasi laba bersih.

Berikut adalah beberapa perubahan standar dalam komponen laba bersih sebelum dan sesudah IFRS dalam PSAK:

1. Pendapatan (PSAK 23)

Sebelum adopsi IFRS Tidak ada peraturan khusus untuk mencatat pendapatan bunga dari aset dan dividen efek. Setelah adopsi IFRS pengaturan lebih jelas untuk pendapatan bunga dari aset dimana bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif dari bunga tersebut. Selain itu peraturan lebih rinci mengenai pendapatan dividen apabila tidak menggunakan metode ekuitas saat yang ditetapkan diterima.

2. Persediaan (PSAK 14)

Agar lebih mencerminkan nilai perusahaan dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan, setelah adopsi IFRS pengakuan beban pokok penjualan penggunaan metode LIFO tidak diperbolehkan. Metode LIFO dapat menimbulkan penyimpangan hasil operasi karena sebagian beban pokok penjualan didasarkan pada biaya yang telah kadaluwarsa.

3. Aset Tetap (PSAK 16)

Setelah adopsi IFRS tambahan aturan imbalan kerja dalam komponen biaya perolehan pada aset tetap, dan pemisahan perhitungan depresiasi dari bagian aset tetap yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan ditujukan agar pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang relevan untuk setiap

keputusan yang dibuat khususnya terkait keuntungan (rugi) dijualnya aset tetap atau beban depresiasi yang dicatat.

4. Terkait Pos Luar Biasa (PSAK 1)

Setelah adopsi IFRS pos luar biasa tidak boleh disajikan karena menurut IAI hal yang dikategorikan luar biasa dapat diartikan berbeda-beda oleh tiap perusahaan sehingga susah untuk dibandingkan satu sama lain, selain itu pos luar biasa ini juga bisa menjadi tempat untuk melakukan manajemen laba sehingga kurang relevan untuk pengambilan keputusan.

Kesimpulan dari beberapa contoh perubahan PSAK diatas adalah, setelah IFRS beberapa isi PSAK dirubah agar memiliki kemampuan menjelaskan suatu nilai perusahaan dengan lebih baik. Artinya informasi yang disajikan diharapkan lebih relevan untuk pengambilan keputusan.

Penelitian Sinarto dan Christiawan (2013) atas relevansi nilai laba pada tahun 2008-2013 menunjukkan bahwa relevansi nilai laba bersih setelah menerapkan IFRS meningkat setelah informasinya dipercaya sudah sesuai dengan standar internasional dan mampu menjelaskan nilai laba bersih dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari signifikansi nilai laba terhadap harga sahamnya, serta meningkatnya *adjusted R square* sebagai ukuran relevansi nilai. Hipotesis pada penelitian Cahyonowati dan Ratmono (2012) pada tahun 2008-2011 ditolak dan dinyatakan tidak terjadi peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi karena dalam periode penelitiannya belum banyak

PSAK yang sudah dikonvergensi dengan IFRS. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Relevansi nilai laba bersih setelah menerapkan IFRS lebih tinggi dibandingkan relevansi nilai laba bersih sebelum diterapkannya IFRS

2.7.2 Hipotesis Kedua

Setelah penerapan IFRS komponen laporan keuangan dalam PSAK 1 (Revisi 2009) mengalami perubahan, dari laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif berisi laba bersih atau laba tahun berjalan dengan komponennya yaitu pendapatan, beban, keuntungan (kerugian) dari transaksi-transaksi suatu periode dan pendapatan komprehensif lainnya (*Other Comprehensive Income*). *Other Comprehensive Income* atau disingkat OCI merupakan informasi baru setelah adopsi IFRS dalam penyajian laporan laba rugi komprehensif. Item-item OCI terdiri dari perubahan surplus revaluasi, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, dan bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas, *et al.*

Adanya tambahan OCI dalam menyajikan laba secara keseluruhan berkaitan dengan perubahan nilai dalam aset-aset perusahaan akibat perubahan waktu. Tambahan OCI ini memberi ruang untuk diterapkannya akuntansi *fair value* sehingga laba komprehensif merupakan laba yang sudah disesuaikan dengan nilai sesungguhnya

perusahaan berdasarkan nilai wajar. Adanya tambahan OCI ini dalam laba komprehensif membuat laba komprehensif lebih lengkap menggambarkan nilai perusahaan, serta informasi yang disajikan juga sudah rinci sesuai dengan hasil aktivitas berjalan dan aktivitas tak terduganya. Ketersediaan informasi yang lebih luas dan berkualitas dapat meningkatkan relevansi nilai informasi tersebut, dikarenakan keputusan yang diambil dapat lebih terinformasi dan berkualitas.

Kanagaretnam, Mathie, dan Shehata (2009) yang meneliti kegunaan melaporkan laba komprehensif di Canada, dengan sampel Perusahaan Canada yang terdaftar di *Toronto Stock* yang menjadi bagian dari *TSE300 index*. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Canada, laba komprehensif memiliki kekuatan hubungan yang lebih besar terhadap harga saham dibandingkan dengan laba bersih. Begitu juga dengan penelitian Sinarto dan Christiawan (2013) meneliti relevansi nilai laba komprehensif dan laba bersih setelah penerapan IFRS. Penelitian tersebut menunjukkan saat menerapkan IFRS nilai *adjusted R square* laba komprehensif lebih tinggi dibandingkan nilai *adjusted R square* laba bersih setelah menerapkan IFRS pada nilai pasar perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

Ha2: Pada kondisi menerapkan IFRS, Laba komprehensif memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih.